

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK
TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (*FULNADI*) DI
PT TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

Lisa Arnita

NPM : 1551020203

Jurusan : Perbankan Syariah

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Pembimbing II : Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/2019 M**

ABSTRAK

Asuransi syariah merupakan perjanjian berdasarkan hukum islam antara pihak asuransi dengan nasabah, dalam menerima amanah dan mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi yang dilakukan dengan syariat islam. Dipahami bahwa praktik asuransi syariah terbentuk dari dua akad yang membentuknya yaitu akad *mudharabah* dan akad tabarru. Salah satu produk dari asuransi syariah yaitu Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*). Produk Takaful Dana pendidikan (*fulnadi*) adalah produk yang ditujukan untuk menyediakan dana pendidikan anak yang manfaatnya dapat dirasakan sampai anak masuk perguruan tinggi.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*) di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung dan bagaimana pandangan ekonomi islam tentang implementasi akad *mudharabah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung. Tujuan penelitian ini untuk untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*) di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung dan untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang implementasi akad *mudharabah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara analisa dalam bentuk lapangan dan uraian. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung. Hasil penelitian ini yaitu penerapan akad *mudharabah* pada PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dimana dalam akad *mudharabah* pihak asuransi sebagai *mudharib* dan peserta asuransi sebagai *shahibul maal* dan dalam akad tersebut nasabah yang menjadi peserta asuransi diwajibkan untuk membayarkan premi yang telah disepakati pada awal perjanjian. Dana premi yang dibayarkan dibagikan ke dalam dua rekening yaitu tabarru dan dana peserta dimana dalam dana tabarru akan digunakan untuk tolong menolong antarpeserta dan dana peserta di investasikan sesuai dengan prinsip syariat Islam yang menganut system bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi di bagi hasilkan dengan peserta. Sedangkan nisbah keuntungan ditetapkan oleh perusahaan, dimana 85% untuk peserta asuransi dan 15% untuk perusahaan.

Kata kunci : *Mudharabah* , AsuransiSyariah, Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lisa Arnita
NPM : 1551020203
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 20 Oktober 2019
Penyusun,

Lisa Arnita
NPM.1551020203



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH
PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN
(FULNADI) DI PT TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG**

Nama : Lisa Arnita

NPM : 1551020203

Jurusan : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunagasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang
Munagasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II

Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I.

NIP. 198008012003121001

Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy

NIP. 198605172015031005

Mengetahui

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNAD) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG**" disusun oleh Lisa Arnita NPM: 1551020203, Jurusan: Perbankan Syariah telah diujikan pada sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden-Intan Lampung pada Hari/tanggal : Kamis, 19 Desember 2019.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang : Hanif, S.E, M.M

Sekretaris : Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I

Penguji I : Nurlaili, M.A

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

NIP. 198008012003121001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat beratsiksa-Nya”(Q.S Al-Maidah (5)2).¹



¹Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta : 1971) hlm.227

PERSEMBAHAN

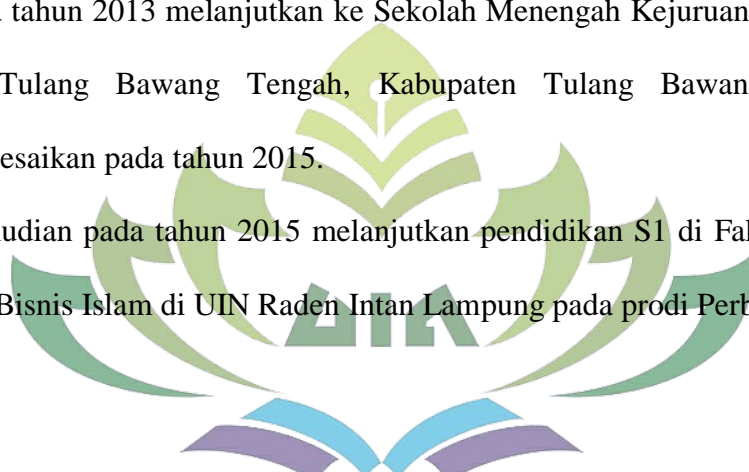
Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka penulis persembahkan skripsi ini pada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Salim dan Ibu Junaidah yang senantiasa memberikan kasih sayang, bimbingan, motivasi, dukungan dan tiada henti-hentinya mendoakanku dan menuntun langkahku hingga tercapainya cita-citaku.
2. Kedua adikku Soldan Agustino dan Siska Anugrah Pratiwi yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan senyuman di setiap langkahku dan mendoakan dengan tulus kepadaku.
3. Seluruh keluarga besarku yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil, perhatian, dan semangat kepadaku.
4. Almamaterku tercinta, Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) RadenIntan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Lisa Arnita, Lahir di Gunung Katun pada 13 April 1996, anak pertama dari pasangan Bapak Salim dan Ibu Junaidah. Riwayat penulis sebagai berikut:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD Negeri Kebon Pala 09 Pagi, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur yang diselesaikan tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 275, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur yang diselesaikan pada tahun 2012.
3. Pada tahun 2013 melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMANegeri 01 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang diselesaikan pada tahun 2015.
4. Kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Intan Lampung pada prodi Perbankan Syariah.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas karunia dan nikmat-Nya yang diberikan kepada kita. Shalawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menuntun umatnya dari zaman kegelapan sampai pada zaman yang terang benderang semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir kelak amin.

Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah (PS) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil sehingga terselesaikannya skripsi ini, rasa hormat dan terimakasih penulis ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof.Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung .
2. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung .
3. Ibu Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy., D.B.A selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung .

4. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si, selaku Pembimbing I yang banyak memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis dengan ikhlas dan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Kurniawan, S.E., M.E.Sy, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Pegawai dan Staff Karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Dosen, Pegawai, dan seluruh staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.
8. Kepada Pimpinan Asuransi Takaful Keluarga Lampung yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung
9. Sahabat perjuangan khususnya kelas F Jurusan Perbankan Syariah angkatan 2015 yang selalu bersama saat proses perkuliahan serta memberikan semangat dan bantuan dalam proses penyusunan skripsi.
10. Teman-teman seperjuangan yang selalu ada Mutiara ariesya, Recha Hariyati, Ayunismiati, yang selalumerikansemangat, dukungan, dandoadalamsetiaplangkahku.
11. Kawan KKN 214PurwodadiPringsewu yang memberikan pengalaman. Semua pihak yang tidak tercantum satu persatu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, 22 september 2019

Penulis

Lisa Arnita

NPM 1551020203



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SURAT PENYERTAAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
G. Metode Penelitian	14

BAB II : KAJIAN TEORI

A. ASURANSI SYARIAH

1. Pengertian Asuransi Syariah.....	20
2. Sejarah Asuransi Syariah	24
3. Landasan Asuransi Syariah	25
4. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional.....	32
5. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah	33
6. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah.....	43
7. Bentuk-bentuk Akad di Asuransi Syariah	49

B. AKAD MUDHARABAH

1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	51
2. Landasan Hukum <i>Mudharabah</i>	56
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	62
4. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	67

C. Tinjauan Pustaka

	69
--	----

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Asuransi Takaful Keluarga Lampung	73
2. Visi, Misi, dan Motto	75
3. Produk-produk Asuransi Takaful Keluarga Lampung	76
4. Data Kepegaiwan	85

B. Implementasi akad mudharabah pada produk Takaful Dana

Pendidikan (*Fulnadi*) di PT.Asuransi Takaful Keluarga

Lampung 86

BAB IV : ANALISIS DATA

A. Implementasi akad mudharabah pada produk Takaful Dana Pendidikan

(*Fulnadi*) di PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung..... 97

B. Pandangan Ekonomi Islam tentang implementasi akad *mudharabah* Pada

Asuransi Syari'ah..... 104

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 110

B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Table 1.1 Daftar Jumlah Nasabahdi PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung.....	11
2. Table 3.1 Data kepegawaian PT.Asuransi Takaful Keluarga Lampung.....	83



DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Table 2.1 Sistem Pada Produk Saving	44
2. Table 2.2 Sistem Pada Produk Non Saving.....	46



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : Berita Acara Munaqosah
3. Lampiran 2 : SK Pembimbing
4. Lampiran 3 : Blanko Konsultasi
5. Lampiran 4 : Surat Izin Riset
6. Lampiran 5 : Daftar Pertanyaan Wawancara
7. Lampiran 6 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul proposal **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG**. Maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut :

1. Analisis adalah sebagai bentuk penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan dan hambatan yang akan terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya.¹
2. Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam bentuk tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap.²
3. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan antara ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap

¹Analisis” (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/analisis> (12 April 2019)

²Oemar Hamalik, *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007), h. 237

terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak tersebut masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul.³

4. Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.⁴
5. Produk Takful Dana Pendidikan (Fulnadi) merupakan produk asuransi yang bertujuan untuk menyediakan dana pendidikan anak yang manfaatnya dapat dirasakan sampai anak masuk ke perguruan tinggi.⁵

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud dengan judul ini adalah “*ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (FULNADI) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG*”.

³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2007). h. 68

⁴Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004), h.75

⁵Brosur Produk PT.Asuransi Takaful Keluarga Lampung.

B. Alasan memilih judul

Beberapa alasan di pilihnya judul **“ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (*FULNADI*) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG”** antara lain:

1. Alasan Objektif

Dalam transaksi keuangan modern terdapat berbagai upaya pengamanan yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak dalam mengatasi kemungkinan akan terjadinya kerugian, baik itu dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya dengan pihak-pihak lain yang menyediakan jasa untuk memberikan jaminan tersebut. Salah satunya adalah asuransi syariah, didalam asuransi syariah telah menawarkan berbagai macam produknya yang dapat menarik minat masyarakat dari berbagai aspek kebutuhan manusia salah satunya produk asuransi takaful dana pendidikan atau *fulnadi*.

Dengan kehadiran asuransi syariah diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap produk produk yang ada di asuransi syariah, keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat dalam investasi asuransi syariah dan juga diharapkan dapat memberikan jaminan dalam berbagai risiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang.

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dibahas didalam proposal ini sesuai dengan studi ilmu yang penulis yang diperlajari selama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Banyaknya referensi yang mendukung sehingga dapat mempermudah penulis dalam menyelesaikan proposal ini.

C. Latar Belakang

Perkembangan zaman menjadikan manusia terlibat dalam berbagai urusan yang kompleks. Tentu dalam menjalani aktivitas banyak kemungkinan ancaman resiko yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Berbagai macam bentuk resiko yang mungkin akan terjadi dalam melakukan aktivitas, yaitu misalkan resiko bangkrut dalam bisnis, resiko kematian, kecelakaan, dan risiko jaminan pendidikan. Hal ini menuntut manusia untuk lebih berhati-hati dalam melangkah.

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya-upaya pengamanan yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan akan terjadinya kerugian, baik itu dengan cara mengalihkan risiko maupun membaginya dengan pihak-pihak lain yang menyediakan diri untuk itu. *Risk transfer* dan *risk sharing* dapat dilakukan melalui suatu perjanjian yang disebut dengan perjanjian pertanggungan atau perjanjian asuransi.

Asuransi merupakan lembaga non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis secara nyata dalam era modern. Seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi, semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus ditanggung oleh masyarakat. Maka dari itu, perlulah sebuah lembaga yang dapat meminimalisir hal itu, yaitu lembaga asuransi.⁶

Asuransi adalah salah satu cara yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membantu mereka dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian orang menyadari pentingnya memiliki jaminan finansial sehingga akhirnya membeli asuransi, namun demikian ada pula yang tidak menyadari betapa pentingnya asuransi. Memiliki asuransi berguna untuk mempersiapkan diri maupun keluarga jika kelak terjadi suatu musibah seperti kecelakaan, penyakit kritis, cacat, meninggal, dan lain sebagainya, atau untuk menyiapkan diri jika pencari nafkah meninggal dunia.⁷

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi antara satu pihak dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut iuran *tabarru'*. Jadi pada sistem ini tidak menggunakan pengalihan risiko (*risk transfer*) di mana tertanggung harus membayar premi

⁶ R. Rezky Kun A. dan Z. Syahrida Sholehah S, *Asuransi Syariah, Cet ke-1*, (Yogyakarta: Parama Publishing: 2015), h. 2.

⁷Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, Cet ke-1*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 4.

(kontribusi), melainkan merupakan pembagian risiko (*risk sharing*) di mana para peserta menanggung, kemudian akad yang digunakan dalam asuransi syariah harus terhindar dari *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga) di samping itu investasi dana harus pada objek yang halal *thoyyibah* bukan berupa barang haram maksiat.

Secara umum jenis asuransi terbagi menjadi dua yaitu, asuransi jiwa (*life insurance*) dan asuransi kerugian (*general insurance*). Dalam asuransi jiwa (*life insurance*) yang dipertanggungkan adalah yang diakibatkan oleh kematian (*death*), kematian tersebut mengakibatkan hilangnya pendapatan seseorang atau suatu keluarga tertentu, dimana resiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu (*time*). Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil terjadinya risiko tersebut, sebaiknya diadakan pertanggungan jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) ialah asuransi yang bertujuan untu kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama.⁸

Dalam asuransi kerugian (*general insurance*) yang diasuransikan adalah benda atau kepentingan seseorang yang melekat pada benda, artinya bukanlah orangnya melainkan kepentingan untuk memperoleh ganti rugi atas biaya pengobatan dan perawatan apabila seseorang yang diasuransikan mengalami kecelakaan, pada asuransi

⁸Abbas Salim, *Asuransi & Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 25.

kerugian, benda-benda yang dapat diasuransikan adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomis.

Akad merupakan kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh dua belah pihak yang saling mengikat diri di antara keduanya untuk bersepakat tentang suatu hal. Syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua belah pihak. Jika nantinya ada pelanggaran kontrak, maka pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.⁹

Akad atau perjanjian yang diterapkan pada asuransi syariah dibagi kepada dua jenis akad, yaitu akad *tabarru* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan tidak mengharapkan imbalan dari pihak lainnya, serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antar sesama dan tidak untuk mencari keuntungan semata. Sedangkan akad *tijarah* adalah segala jenis akad yang berorientasi pada keuntungan atau dilakukan untuk tujuan komersial.

Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) keuntungan yang didapat dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena pengelola menanggung

⁹M. Nur Rianto Al Arif, *Pemasaran Strategik pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), h. 13.

kerugian lain berupa tenaga dan waktu.¹⁰ Berdasarkan kontrak *mudharabah* ini ada dua cara pengelolaan dana pada asuransi syariah yaitu pengelolaan dana yang memiliki unsur tabungan (*saving*) dan pengelolaan dana yang tidak memiliki unsur tabungan (*non saving*), adanya unsur tabungan dan tidak adanya unsur tabungan ini berkaitan dengan produk.¹¹

Produk adalah barang atau jasa yang bisa ditawarkan di pasar untuk mendapatkan perhatian, permintaan, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan. Pembeli akan membeli produk kalau merasa cocok, karena itu produk harus disesuaikan dengan keinginan ataupun kebutuhan pembeli, agar pemasaran produk berhasil.¹²

Pendidikan menentukan masa depan seseorang, dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap tahunnya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Dari tuntutan zaman yang membutuhkan kualitas pendidikan yang lebih baik kedepannya yang berdampak kepada meningkatnya biaya. Dengan mengikuti program Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*) diharapkan kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak yang bertanggung akan terjamin, apabila

¹⁰Tazkia Ashfia, dkk, Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, h. 5.

¹¹Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat, Cet ke-1*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 33.

¹²M. Fuad, dkk, *Pengantar Bisnis, Cet ke-1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 128.

pihak bertanggung kepada anak-anaknya atau apabila bertanggung meninggal dunia sebelum anak-anaknya dewasa dan masih memerlukan pendidikan.¹³

Salah satu jenis perusahaan asuransi jiwa syariah yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang di Indonesia salah satunya adalah PT Asuransi Takaful Keluarga yang berada di Lampung. PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang menaruh perhatian bagi perkembangan perasuransian di Lampung khususnya perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk dapat bermuamalah berdasarkan syariah islam. Selaku perusahaan yang mengelola resiko dari peserta yang diasuransikan dengan sistem *sharing of risk*, dimana antara peserta atau pemegang polis yang diasuransikan berkontribusi dengan sejumlah dana (premi) tertentu yang berujuan untuk tolong menolong antara peserta satu dengan lainnya yang tertimpa musibah.

Dalam memperkenalkan usaha PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung kepada masyarakat perusahaan menggunakan strategi dengan bekerja sama dengan lembaga-lebaga keuangan yang berprinsipkan syariat islam. Untuk melakukan kontrak asuransi takaful dana pendidikan bisa dilakukan juga dengan cara membuka polis asuransi. Polis asuransi merupakan isi dari kontrak asuransi, dalam polis asuransi berisi hak-hak dan kewajiban dari pihak penanggung dan

¹³Brosur Asuransi Takaful Dana Pendidikan di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung.

tertanggung, syarat-syarat dan prosedur pengajuan klaim jika terjadi peristiwa yang di asuransikan, prosedur dan cara pembayaran premi oleh pihak tertanggung, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.¹⁴ Setelah terjalin kerja sama, semua nasabah yang melakukan asuransi takaful dana pendidikan tersebut mendapatkan asuransi jiwa dengan polis yang telah ditetapkan perusahaan asuransi dan semua sistem pengurusannya semua melalui pihak asuransi.

Pengelolaan dana asuransi ini dilakukan secara terpisah dalam dua rekening yang berbeda, kumpulan dana peserta diinvestasikan oleh perusahaan dan setiap keuntungan yang di dapat dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut prinsip *mudharabah*. Sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.¹⁵

Berikut jumlah nasabah Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*) dari tahun 2015-2018.

Table 1.1
Jumlah Nasabah Takaful Dana Pendidikan (*fulnadi*)

No	Tahun	Jumlah Nasabah
1	2015	200
2	2016	250
3	2017	160
4	2018	120

¹⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet ke-4, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 259.

¹⁵ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan mengambil judul “**ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH* PADA PRODUK TAKAFUL DANA PENDIDIKAN (*FULNADI*) DI PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA LAMPUNG**”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti akan merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi akad *Mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*) di PT asuransi takaful keluarga Lampung ?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam tentang implementasi akad *mudharabah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *Mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*) di PT asuransi takaful keluarga Lampung.
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi islam tentang implementasi akad *mudharabah* di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan atau diterapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan tentang ilmu pengetahuan dan juga bisa memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman khususnya yang berkaitan dengan implementasi akad *mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan (*fulnadi*) di PT Asuransi Takaful Keluarga Lampung.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai asuransi syariah khususnya tentang implementasi akad *mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan (*fulnadi*) serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah.

b. Bagi Akademisi

Hasil ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di UIN Raden Intan Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dalam memahami persoalan tentang akad *mudharabah* dalam asuransi syariah.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit social, baik itu individu, kelompok, lembaga maupun masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini obyek penelitiannya yaitu mengenai implementasi akad *mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan di PT. Takaful Keluarga Lampung.

2. Sumber Penelitian

a. Sumber data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber data yang berbeda, yaitu :¹⁷

1. Data Primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, data primer biasanya diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan

¹⁶Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian, Cet. Ke-II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1988), h. 22

¹⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian, Cet ke-2*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 179.

data orisinal.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis memperoleh data langsung dari PT Asuransi Takaful Keluarag Lampung.

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, website, sumber-sumber tertulis lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data-data yang diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, internet yang mendukung serta berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu melakukan komunikasi langsung untuk memperoleh informasi, penjelasan, pesan dan tanggapan dari sumber empirik. Dalam teknik kualitatif, wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh data dari sumber secara cermat serta kecakapan berinteraksi dan beradaptasi dengan

¹⁸Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009), h.148.

baik dengan masyarakat yang akan di amati dan di wawancarai.¹⁹

Dalam hal ini peneliti mawawancarai secara langsung terhadap staff administrasi perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarag Lampung, untuk memperoleh data-data yang mendukung untuk penelitian.

c. Observasi

Observasi disebut juga sebagai metode pengamatan, singkatnya metode observasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis.²⁰ Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati bagaimana pelaksanaan akad *mudharabah* yang adadi perusahaan Takful Bandar Lampung.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan observasi, dokumen dapat berupa bentuk surat-surat, gambar/foto, atau catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian, teknik dokumentasi didapatkan dari rekaman dan dokumemen.²¹

¹⁹Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian* (Malang: UIN Fakultas Syari'ah, 2006), h.15.

²⁰Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2008), h. 83

²¹Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras. 2009), h.184.

Data-data yang peneliti kumpulkan melalui dokumentasi yaitu mengenai profil, visi dan misi, struktur organisasi, produk asuransi takaful dana pendidikan, form surat permintaan asuransi jiwa syariah, polis asuransi syariah, dan form pengajuan klaim.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk kemudian ditarik kesimpulannya.²² Dalam penelitian ini yang dimaksud populasi adalah karyawan staf dari PT Asuransi Takaful Keluarag Lampung dengan jumlah karyawan sebanyak 14 orang dan nasabah asuransi takaful dana pendidikan (*fulnadi*) yang berjumlah 120 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, artinya bahwa sebagian anggota yang mewakili dari populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 maka sampel adalah dari jumlah populasi, namun jika

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 300

populasi lebih dari 100 maka sampel yang diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25%.²³

Maka penulis mengambil sampel berdasarkan pendapat Surhasini Arikonto, $10\% \times 134 = 13,4$ maka dibulatkan menjadi 13 orang yang. Jadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 13 orang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga diambil suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini adalah kegiatan yang terkait dengan upaya memahami, menjelaskan, menafsirkan dan mencari hubungan diantara data-data yang diperoleh.²⁴

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan member pola, susunan, urutan, klasifikasi, pentemuan dan sebagainya sehingga data-data tersebut dapat dipahami dan ditafsirkan. Analisis dalam bentuk ini lebih pada peneliti untuk menguraikan data secara sistematis, terpola sehingga menghasilkan satu pemahaman yang baik dan utuh.²⁵

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan

²³ *Ibid*

²⁴ Lexy K. Moloeong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 5.

²⁵ *Ibid*

kondisi yang sebenarnya.²⁶ Dengan metode analisis ini peneliti berusaha menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan tentang analaisis implementasi akad *mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan (*fulnadi*).



²⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1990), h. 352

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam bahasa belanda, kata asuransi disebut juga *assurantie* yang terdiri dari asal kata “*assaradeur*” yang berarti penanggung dan “*geassureede*” yang berarti tertanggung, kemudian dalam bahasa perancis disebut “*assurance*” yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Adapun dalam bahasa latin disebut “*assecurare*” yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut juga “*insurance*” yang memiliki arti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.²⁷ Dalam bahasa Arab, istilah asuransi adalah *at-ta'min*, diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.²⁸ Asuransi itu dinamakan *at-ta'min* setelah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi. Pengertian yang lain dari *at-ta'min* adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar pemegang polis atau ahli warisnya

²⁷Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.261

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 5.

mendapatkan sejumlah uang bagaimana yang telah disepakati atau untuk mendapatkan ganti rugi terhadap hartanya yang hilang.²⁹

Istilah lain asuransi syariah juga dikenal dengan nama *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko diantara sesama sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan caramasing-masing mengeluarkan dana *tabarru*, dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.³⁰

Sedangkan mengenai asuransi syariah, asuransi syariah secara terminologi adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi ialah sebagai salah satu cara yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk mengatasi terjadinya musibah di dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik itu terhadap dirinya sendiri, keluarga, maupun

²⁹Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 28.

³⁰*Ibid.*

perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.³¹

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang Pedoman umum Asuransi Islam mengartikan tentang asuransi menurutnya, Asuransi islam (*Ta'min, Takaful, Tadhamun*) yakni usaha saling melindungi dan saling tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (pertukaran yang sesuai dengan syariah).³²

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa pengertian asuransi secara istilah berarti kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya asuransi adalah suatu cara atau metode yang dapat digunakan untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang

³¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 245.

³²Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

yang tertimpa musibah. Penggantian tersebut berasal dari premi yang dibayarkan oleh peserta.³³

Menurut Husain Hamid Hisan, asuransi atau *atta'min* merupakan sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan ini, maka bantuan tersebut dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi atau *at-tamin* adalah saling tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan adanya *at-ta'min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.³⁴

Dari definisi-definisi yang telah dijelaskan di atas nampak bahwa Asuransi Syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan (*ta'awun*).Yaitu, prinsip hidup saling

³³Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 222

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat, Cet ke-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 241

melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhwah islamiah* antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi risiko.³⁵

2. Sejarah Asuransi Syariah

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi syariah. Hal ini dikarenakan operasional bank syariah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Umum) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa (ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Departemen Keuangan (Depkeu),

Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993. Tim TEPATI memulai kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan

³⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 26

seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.³⁶ Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (Ketua Umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fali Yusof (CEO Syarikat Takaful Malyasia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).³⁷

3. Landasan Asuransi Syariah

Pada saat ini masalah kekhawatiran, keamanan, risiko jiwa dan harta, serta perlunya asuransi merupakan isu yang sangat menyibukkan pikiran manusia karena cukup banyak orang yang dilanda ketakutan, kegelisahan memikirkan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda yang mereka miliki. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila seseorang mencoba meminimalisir risiko jiwa dan harta benda yang

³⁶Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet ke2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 218.

³⁷*Ibid*

mereka miliki. Dalam rangka meminimalisasi risiko kerugian tersebut, maka munculah berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan rasa aman dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran.³⁸ Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam memberi nilai legalisasi dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah : Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW.

Dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah (5) : 2

لَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالْتَقَوَى ۖ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
 الْعِقَابِ شَدِيدًا

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya³⁹

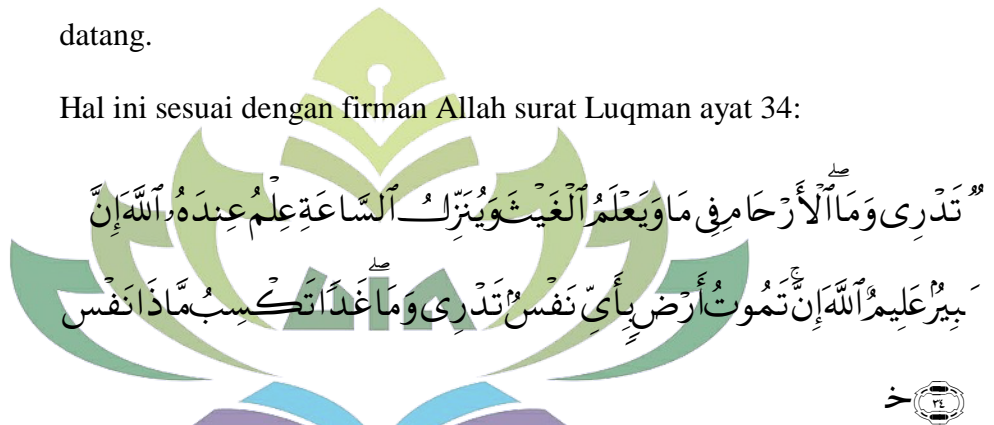
Dari ayat diatas dijelaskan bahwa saling bekerja sama atau saling membantu, yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang diderita.

³⁸Uswatun Hasanah, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol 47 No. 1, (Juni 2013), h. 246.

³⁹Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), Q.S. Al-Maidah (5) : 2, h. 106.

Dalam fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan manusia lain yang hidup dalam masyarakat. Agar hidup manusia itu ringan, manusia harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Asuransi Islam pada hakikatnya adalah saling tolong antar sesamanya. Dengan tolong-menolong kehidupan manusia akan lebih mudah dan sejahtera, karena tidak seorang pun tahu nasibnya di masa akan datang.

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Luqman ayat 34:



Artinya :*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pula yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui lagi Maha mengenal”*⁴⁰

Dari ayat yang sudah dikemukakan diatas jelas bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, biasanya manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan apa yang akan terjadi besok pagi atau di masa yang akan datang ia tidak tahu. Sebagai manusia yang hanya

⁴⁰Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), Q.S. Luqman (31); 34, h. 557.

diberi kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang, agar segala sesuatu yang bernilai negatif, dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisasi kerugiannya.⁴¹

Ijma yaitu kesepakatan para mujtahid atau suatu hukum *syara'* mengenai suatu peristiwa yang terjadi setelah Rasul wafat.⁴² Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adanya *ijma'* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran dana yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian secara tidak sewenang-wenang).

Dalam hal ini kelompoklah yang menanggung pembayarannya, karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya sahabat yang menentang khalifah Umar bisa

⁴¹AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 107

⁴²Abdul Wahbah Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), h. 62.

disimpulkan bahwa terdapat *ijma'* dikalangan sahabat Nabi SAW mengenai persoalan ini.⁴³

Qiyas adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat keuntungannya didalam Al-Qur'an dan As-sunnah karena persamaan illat (penyebab atau alasannya).⁴⁴ Ide pokok dari *aqilah* adalah suku arab zaman dulu yang harus siap untuk melakukan kontribusi financial atas nama si pembunuh, untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan membayar premi ide praktik asuransi syariah. Dalam hal ini praktik yang mempunyai nilai sama dengan asuransi adalah praktik *aqilah*.

Prinsip dasar ekonomi syariah pada hakikatnya telah diatur sedemikian rupa dalam hukum islam. Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber utama hukum islam ini memberikan pesan yang sangatlah jelas bahwa ekonomi syariah harus terbebaskan dari unsur-unsur riba, gharar dan praktik lainnya yang mengarah pada nilai kebathilan dan kemudharatan.⁴⁵ Kata yang baik (*thayyibah*) dan halal merupakan standar baku dalam ekonomi Islam, baik dan halal dapat dipandang dari beberapa sisi, pertama baik dan halal dari sisi cara

⁴³Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 122

⁴⁴Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam.....*, h. 74.

⁴⁵Taufiqul Hulam, Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22. No. 3, (Oktober 2010), h. 522.

mendapatkannya, tidak melalui penipuan dan riba, Kedua baik dan halal dari segi fisiknya (zatnya), bukan usaha minuman keras, ketiga baik dan halal pada waktu pemanfaatan. Kriteria baik dan halal tersebut pada saat ini tidak lagi dijadikan patokan, melainkan sejauh mana kesempatan untuk mengkonsumsi sebanyak mungkin, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang ada, inilah gejala yang mewarnai kehidupan ekonomi modern.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legalitasnya pada Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha perasuransian, PP No.81 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas PP No.73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur asuransi sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Rahaeja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Tenaga Kerja), dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).⁴⁶

Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum diatur secara khusus dalam Undang-undang. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan yang mengatur asuransi secara umum dan sejumlah peraturan yang dikhususkan meregulasikan asuransi syariah,

⁴⁶Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 256.

antara lain Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang peneraan prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi dengan prinsip syariah, Peraturan Ketua BAPEPAM-LK Nomor. PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana Yang Diperlukan Untuk Mengantissipasi Risisko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' Dan Perhitungan Jumlah Dana Yang Harus Disediakan Perusahaan Untuk Mengantisipasi Kerugian Yang Mungkin Timbul Dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. Peraturan ketua BAPEPAM-LK Nomor. PER06/BL/2011 Tentang Bentuk Dan Susunan Laporan Serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. PMK No.11/PMK.010/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Auransi Dan Usaha Resuransi Dengan Prinsip Syariah.

Disamping itu, dalam menjelaskan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Asuransi Syariah.⁴⁷ Dalam fatwa tersebut yang dimaksud dengan Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, atau Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan

⁴⁷Jelisye putrid Cennery, Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, "Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement", *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5. No. 1 (Desember 2018), h. 836.

tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi melalui asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁴⁸

4. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Perbedaan Asuransi syariah dnegan Asuransi konvensional meliputi :

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan mengawasi manajemen, produk serta kebajikan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariah Islam.
2. Prinsip asuransi syariah adalah *takaful* (tolong-menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional *tadabulli* (jual-beli) antara nasabah dengan perusahaan.
3. Dana yang terkumpul dari nasabah/pemegang polis perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan system bunga.

⁴⁸Arif Effendi, Asuransi Syariah Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah), *Jurnal Wahan Akademia*, Vol. 3 No. 2 (Oktober 2016), h. 76.

4. Premi yang terkumpul diperlukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengalokasikannya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru* seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.
6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dan dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim maka nasabah tidak akan mendapatkan apa-apa.⁴⁹

5. Prinsip-prinsip Dasar Asuransi Syariah

Secara umum asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah dijalankan berdasarkan niat untuk saling menolong dan membantu antar sesama peserta. Oleh karena itu

⁴⁹Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, EKONISIA, edisi Pertama, Januari 2003), h. 117

prinsip-prinsip di dalam asuransi syariah harus sesuai dengan agama islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:⁵⁰

1. *Tauhid* (Ketakwaan).

Pada prinsip *tauhid* asuransi syariah dijalankan atas dasar muamalah yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Jika dicermati ayat-ayat Al-Qur'an tentang muamalah, maka akan nampak dengan jelas bahwa Allah selalu menyeru kepada umat-Nya agar muamalah yang dilakukannya membawanya kepada ketakwaan Allah. Seorang muslim ketika membeli dan menjual, menyewakan dan mempekerjakan, melakukan penukaran satu dengan lainnya dalam harta atau berbagai kemanfaatan, ia selalu tunduk kepada aturan Allah dalam muamalah-nya. Ia tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram misalkan riba, penimbunan, zalim, menipu, berjudi, mencuri, menyuap dan menerima suapan. Allah meletakkan prinsip tauhid (ketakwaan) ini sebagai prinsip utama dalam muamalah.

⁵⁰Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47 No 1 (Juni 2013), h. 249.

Dengan demikian, niat dalam asuransi syariah hendaklah tidak hanya untuk berinvestasi memperoleh keuntungan, melainkan lebih luas lagi yaitu untuk memperoleh pahala dari Allah SWT, dengan muamalah yang sesuai ketentuan Allah.⁵¹

2. *Al-‘Adalah* (bersikap adil)

Cukuplah bagi kita bahwa Al-quran telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Syaikh al-Qaradhawi mengatakan bahwa sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri diatas kemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu “keadilan”. *Al-‘Adl* adalah termasuk di antara nama-nama Allah (*Asma’al-Husna*). Lawan kata dari keadilan adalah kezaliman (*al-zulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hambahambanya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan membenci orang-orang yang berbuat zalim, bahkan melaknat mereka.⁵²

Sikap adil dibutuhkan ketika menentukan nisbah *mudhrabah*, *musyarakah*, *wakalah*, *wadi`ah* dan sebagainya. Sikap adil juga diperlukan ketika asuransi syariah menentukan bagi hasil

⁵¹Teguh Suropto dan Abdullah Salam, “Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.VII No. 2 (Desember 2017), h.13.

⁵²*Ibid*

dalam *surplus underwriting* dan bagi hasil investasi antara perusahaan dan peserta. Karena itulah, transparansi dalam perbankan dan asuransi syariah menjadi sangat penting.

Dalam prinsip keadilan ini, asuransi syariah telah memberikan keadilan yang sebenarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi peserta asuransi untuk mengumpulkan dana dan mengembalikan dana itu kembali jika peserta mengakhiri perjanjian dalam asuransi.

3. Kerja Sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) adalah prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari khaliq-Nya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial.

Kerja sama yang dilakukan dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *mudharabah* atau *musyarakah*.

Ta'awun adalah salah satu prinsip utama dalam interaksi muamalah. Bahkan *ta'awun* dapat menjadi fondasi dalam membangun sistem masyarakat, yang kaya memperhatikan yang miskin dalam hal kebutuhan financial dan yang miskin membantu orang kaya dalam hal tenaga atau yang lainnya. Konsep *ta'awun* (tolong-menolong) ini merupakan inti dari konsep *takaful*, dimana antara satu peserta dengan peserta lainnya saling menanggung risiko, yakni melalui mekanisme dana *tabarru'* dengan akad yang benar yaitu '*Aqd Takafulli* atau '*Aqd Tabarru'*.

Takaful dapat menjadi solusi agar masyarakat lepas dari kemiskinan, karena perhatian orang-orang yang kaya terhadap yang miskin telah diatur dalam syariah. Janganlah kekayaan itu hanya berputar di sekitar orang-orang kaya saja, di sekitar para konglomerat saja.⁵³

4. *Al-Amanah* (tepercaya/jujur).

Menurut Yusuf al-Qaradlawi, di antara nilai transaksi yang terpenting dalam bisnis adalah *al-amanah*. *Al-amanah* merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang yang beriman. Bahkan, kejujuran merupakan karakteristik para Nabi. Tanpa adanya kejujuran, maka kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan di dunia tidak akan

⁵³ *Ibid*

berjalan dengan baik. Sebaliknya, kebohongan adalah cabang kemunafikan dan merupakan salah satu ciri orang-orang munafik. Cacat pasar perdagangan di dunia kita dan yang paling banyak memperburuk citra perdagangan adalah kebohongan, manipulasi dan mencampur adukkan antara kebenaran dengan kebatilan, baik secara dusta dalam menerangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya, atau dalam memberitahukan tentang harga belinya atau harga jualnya kepada orang lain maupun tentang banyaknya pemesanan.⁵⁴

5. *Al-Rida* (suka sama suka)

Dalam al-Qur'an Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu". Menurut Abul A'la al-Maududi, ayat tersebut telah menetapkan dua perkara sebagai syarat sahnya suatu perdagangan. Pertama, hendaknya perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka di antara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain.

Di sinilah pentingnya prinsip *al-rida* (suka sama suka) dalam muamalah. Karena, tanpa dilandasi dengan keridaan, maka

⁵⁴Teguh Suropto dan Abdullah Salam, Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.VII No. 2 (Desember 2017), h.135

seluruh akad dalam mu'amalah akan menjadi batal. Keridhaan dalam bermuamalah merupakan syarat sahnya akad antara kedua belah pihak, sedangkan mengetahui adalah syarat sah ridha. Faktor mengetahui menjadi syarat sah nya ridha, agar dalam transaksi tersebut tidak terjadi gharar.⁵⁵ Dengan demikian, kedudukan prinsip keridaan sangat penting dalam akad-akad yang dibuat dalam bisnis asuransi syariah yang dilandasi hukum syariah.

6. Tidak mengandur riba

Riba dalam bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, riba secara umum berarti pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. Dalam setiap transaksi, seseorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak benar, salah satunya ialah riba.

Pada asuransi syariah, masalah riba ini dieliminir dengan konsep bagi hasil atau dengan kata lain *mudharabah*. Seluruh bagian dari proses operasional yang didalamnya menganut system riba , diganti dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang sesuai dengan prinsip islam. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga, semua

⁵⁵ *Ibid*,

menggunakan instrument akad syariat islam yang terbebas dari riba.⁵⁶

7. Tidak mengandung Perjudian (*Maisir*)

Allah SWT telah memberi pengesan terhadap keharaman melakukan aktivitas ekonomi yang mempunyai unsur judi. Safi'I Antonio mengatakan bahwa unsure *maisir* merupakan salah satu pihak yang mendapat untung, namun pihak lain nya mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila peserta dengan sebab tertentu membatalkan kontrak perjanjian *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka pihak yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uangnya yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil uangnya. Juga adanya unsure keuntungan yang diperoleh yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, dimana untung rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.⁵⁷ Dalam asuransi syariah, *Resversing Priod*, bermula dari awal perjanjian dimana setiap peserta mempunyai hak untung mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yitu, yang telah diniatkan untuk dana

⁵⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) : Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 176

⁵⁷Hasan ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Prakti*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 133

tabarru' yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Masalah asuransi syariah diatas dapat selesai dengan adanya kebenaran dalam akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dan peserta ke dalam dua rekening khusus untung menampung dana *tabarru'* yang tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta asuransi bisa mengambil uangnya , dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir* atau perjudian, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.⁵⁸

8. Tidak mengandur *gharar* (ketidakpastian)

Dalam bahas *Gharar* berarti *al-khida* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya tidak ada unsur kerelaan. Wahbah al-Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghri*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampak menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian. Oleh karena itu, dikatakan *ad-dunya mata'ul ghuruur* yang artinya dunia adalah kesenangan penipuan.⁵⁹

⁵⁸Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 176

⁵⁹Hasan ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Prakti*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 136

Sesuai dengan syarat-syarat akad pertukarang, maka dalam akad harus jelas berapa pembayaran premi yang akan dibayar dan berupa uang pertanggungan yang akan didapat. Masalah hukum syariah disinilah muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang dibayarkan, sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul, dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang nantinya akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa nantinya kita akan meninggal atau mungkin sampai kapan akhir kontrak kita tetap hidup disinilah *gharar* terjadi.

Dari berbagai macam prinsip prinsip asuransi syariah yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwasanya dalam asuransi syariah lebih mengedepankan sikap adil, rasa tenang, aman, dan tolong menolong antar sesama peserta serta menjauhi sikap curang dan menjauhi transaksi yang operasionalnya bersifat *gharar*, *maisir* dan *riba*. Prinsip-prinsip asuransi ini telah dijalankan dengan baik oleh entitas asuransi, hal ini terbukti dari pelaksanaan akad asuransi yang telah dijalankan dengan kesepakatan kedua belah pihak, serta pengelolaan dana asuransi dari peserta telah sesuai dengan prinsi syariah.

6. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Di dalam operasional asuransi syariah pengelolaan dana yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi di antara para peserta asuransi. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (*amanah*) oleh para peserta untuk mengelola premi yang diterima dan mengembangkannya dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada peserta jika mengalami musibah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama berdasarkan akta perjanjian jenis akad.⁶⁰

Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pengelola modal. Keuntungan yang akan diperoleh dari pengembangan dana tersebut akan dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh pihak nasabah dengan perusahaan asuransi. Dalam asuransi syariah mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan yang disebut dana investasi dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan yang disebut dana *tabarru'*. Kedua jenis dana tersebut, diuraikan sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.51

⁶¹*Ibid*

a. Sistem yang mengandung unsur tabungan

Pada produk yang mengandung unsure tabungan peserta wajib membayar sejumlah premi secara teratur kepada perusahaan. Besar kecilnya premi tergantung keinginan peserta, akan tetapi, perusahaan menetapkan sejumlah minimum premi yang harus dibayarkan, Setiap peserta dapat membayar premi tersebut melalui rekening Koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik pilihan pembayaran pada setiap bulan, kuartal, semester, maupun tahunan. Karena itu, setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu rekening tabungan dan rekening tabarru.⁶²

Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik pesera, yang dibayarkan bila: perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, dan peserta meninggal dunia. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebijakan tujuan saling membantu dan tolong-menolong, yang dibayarkan bila: peserta meninggal dunia, perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).

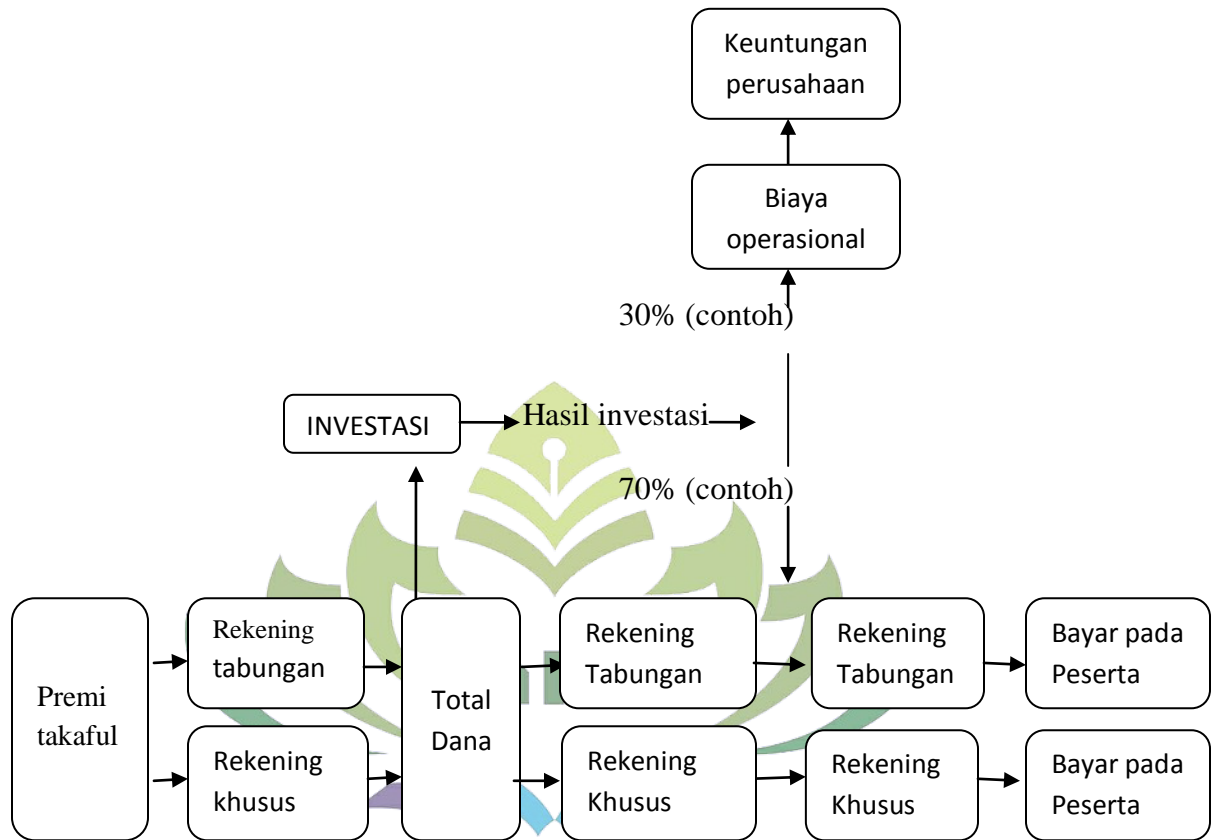
⁶²Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga, Cet ke-1*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), h. 74

Kumpulan dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa setiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi), akan dibagi menurut prinsip *al-mudharabah*. Persentase pembagian *mudharabah* (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta asuransi syariah.



Skema 1.1

Sistem pada produk Saving (ada unsur tabungan)



b. Sistem yang tidak mengandung tabungan.

Untuk sistem yang tidak mengandung unsur tabungan adalah dana yang disimpan pada rekening *tabarru'* oleh perusahaan dalam satu rekening khusus, sehingga bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta asuransi syariah untuk kepentingan tolong menolong dan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia,

dan perjanjian telah berakhir (jika ada *surplus*). Kumpulan dana *tabarru'* dari setiap peserta dimaksud, akan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara peserta asuransi syariah. Keberadaan rekening *tabarru'* menjadi sangat penting untuk menjawab pertanyaan seputar ketidakjelasan (*gharar*) asuransi dari sisi pembayaran klaim.⁶³

Dari dua mekanisme pengelolaan dana di atas, terdapat dua produk yang ada dalam asuransi syariah, yaitu asuransi umum dan asuransi jiwa. Asuransi umum adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan finansial untuk mengantisipasi kerugian atas harta benda milik peserta asuransi.⁶⁴ Sedangkan menurut Syafi'I Antonio seperti yang dikutip Burhanuddin S, Asuransi Jiwa merupakan bentuk asuransi bersifat individu yang melindungi setiap musibah yang terjadi pada diri peserta asuransi. Dari dua produk asuransi ini yang membedakannya adalah pada asuransi umum karena merupakan asuransi yang mengcover kerugian, maka produk ini bersifat non tabungan sehingga peserta hanya

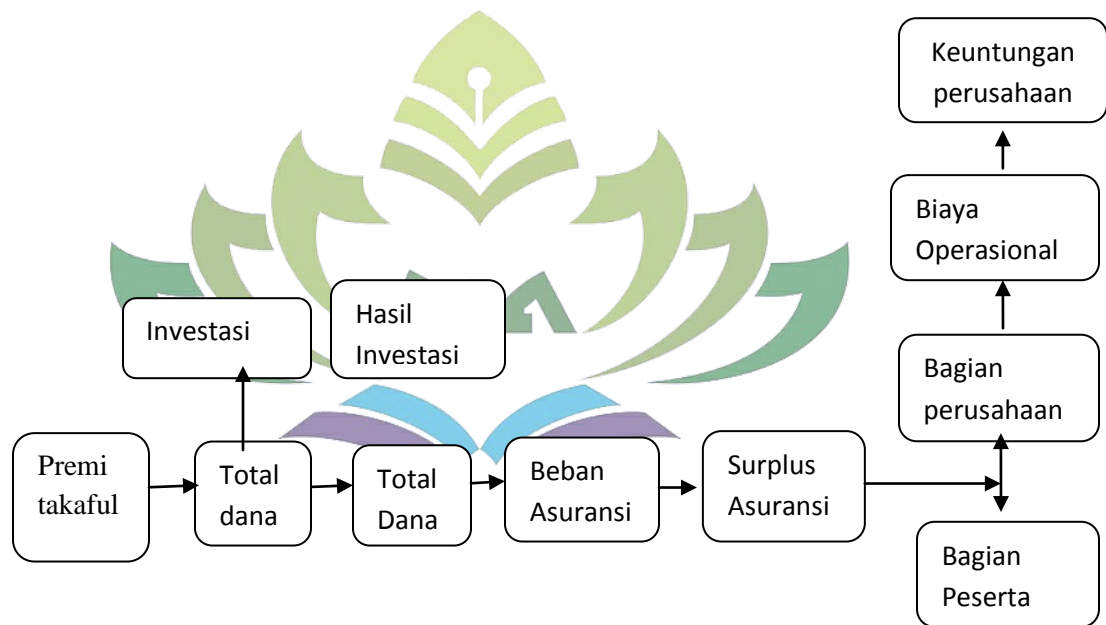
⁶³Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke1*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 122.

⁶⁴*Ibid*

membayar dana *tabarru* saja. Pada asuransi jiwa yang bersifat individu, maka dalam produk ini selain menawarkan jasa untuk mengcover setiap musibah yang terjadi pada peserta, perusahaan asuransi atau pengelola juga menawarkan tabungan yang tujuannya untuk investasi.⁶⁵

Skema 1.2

Sistem pada Produk Non Saving



⁶⁵ *Ibid*

7. Bentuk-bentuk akad di Asuransi Syariah

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, akad dapat dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi syariah terdiri atas dua akad yaitu:⁶⁶ akad *tijarah* dan akad *tabarru*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah akad *mudharabah* sedangkan akad *tabarru* adalah hibah.

a. Akad *Tabarru* (hibah)

Dalam akad *tabarru* peserta memberikan sejumlah dana ke perusahaan dengan tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama peserta asuransi apabila ada diantara salah satu nasabah yang mengalami musibah, dana klaim yang diberikan dari rekening khusus yaitu rekening *tabarru* yang sudah diniatkan di awal oleh peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah untuk kepentingan dana kebajikan dan tolong menolong antar sesama peserta asuransi syariah.⁶⁷

Setiap periode pengelolaan dana *tabarru* akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu: *Surplus Underwriting* dan *Defisit Underwriting*. *Surplus Underwriting* ialah ketika total dana yang terkumpul lebih besar dari total klaim dan biaya-biaya

⁶⁶M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Cet ke-, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 225.

⁶⁷Muhammad Syakir Sula, *Principles: Of Islamic Insurance Prinsip-prinsip Asuransi Syariah Life General and Social Insurance*, h. 185.

lain dalam satu periode sedangkan *Defisit Underwriting* adalah total klaim dan biaya-biaya yang ada lebih besar dari dana yang sudah terkumpul.

Mengenai ketentuan bagi hasil jika mengalami *surplus underwriting* dana *tabarru*, maka perusahaan selaku pengelola dana dapat menentukan pilihan dalam pembagian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan para peserta asuransi, yaitu seluruh hasil keuntungan ditambahkan kedalam rekening *tabarru*, sebagian ditambahkan kedalam rekening *tabarru* dan sebagian dibagikan kepada peserta asuransi atau sebagian dibagikan kepada peserta asuransi dan sebagian dibagikan kepada perusahaan.

Namun jika sebaliknya perusahaan mengalami *Defisit* dana akibat banyaknya klaim yang harus dibayar perusahaan, maka perusahaan wajib memiliki kemampuan untuk memberikan pinjaman dalam bentuk *qardh* kepada dana *tabarru* dengan menyetorkannya kedalam rekening *tabarru* secara tunai. Sedangkan pengembalian *qardh* dilakukan jika dana *tabarru* telah mengalami *surplus underwriting*.

b. *Akad Tijarah (mudharabah)*

Akad tijarah adalah usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut serta dalam penyertaan modal). Jadi salah satu peserta memberikan 100% modalnya kepada pihak asuransi untuk dikelola dan hasil dari keuntungan usahanya dibagi berdasarkan atas kesepakatan diawal perjanjian yang dituangkan dalam polis asuransi syaria'iah.⁶⁸

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Akad adalah sebuah kontrak atau perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak yang saling mengikat untuk bersepakat tentang suatu hal, syarat dan ketentuan harus dijelaskan secara terperinci oleh kedua pihak. Jika terjadi pelanggaran kontrak, pihak yang melanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak tersebut.⁶⁹

Kata *mudharabah* secara etimologis memiliki arti diatas muka bumi yang biasanya dinamakan bepergian, sedangkan secara terminologis *Mudharabah* ialah suatu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabal-mal*) dan pengguna dana (*mudharib*) digunakan

⁶⁸Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah, Cet ke-1*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007), h. 159.

⁶⁹*Ibid*

untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal dan pemilik modal tidak boleh intervensi kepada pengelola dana.⁷⁰

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini, *Qiradh*, *Muqaradhah*, dan *Mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada ada perbedaan yang menonjol, hanya saja perbedaannya dapat dilihat dari factor geografis (tempat penerapannya). Kata *Mudharabah* berasal dari kata *al-dharb* yang artinya secara harfiah berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb* juga sering dikenal *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.⁷¹

Menurut istilah *mudharabah* dikemukakan oleh beberapa ulama sebagai berikut: Menurut Malikiyah, *Mudharabah* ialah akad perwakilan dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya pada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* yaitu memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta

⁷⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 195.

⁷¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 135.

diserahkan kepada yang lain dan pihak lain punya jasa mengelola harta tersebut.

Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.⁷²

Definisi tentang *mudharabah* atau *qiradh* sebagaimana yang dikemukakan para ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* merupakan bagian dari jenis *syirkah*, yang berhubungan dengan kerja sama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal, persentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka

⁷²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 113-114.

ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.⁷³

Dalam konteks perbankan syariah, definisi teminologi *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dalam *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan diawal kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian modal, sedangkan apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁴

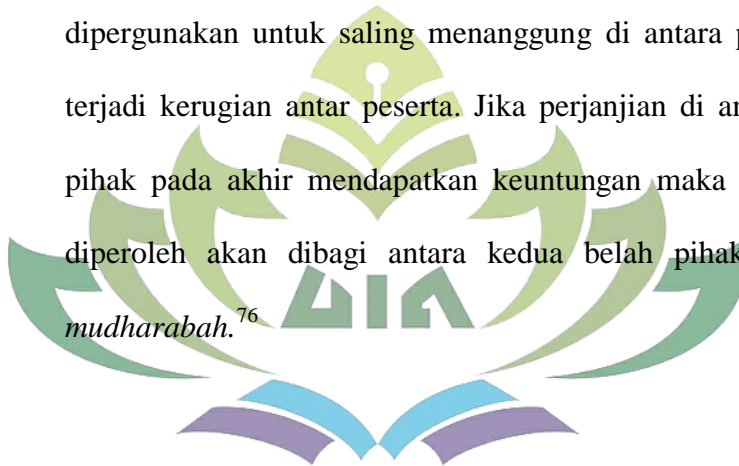
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan usaha yang produktif. Selanjutnya, pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga diterangkan bahwa dalam pembiayaan *mudharabah* LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan

⁷³Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah, Cet ke-1*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 159.

⁷⁴Ruslan Abdul Ghofur, Konstruksi Akad, dalam *Jurnal Al-'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, (Juni 2015), h. 495

pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁷⁵

Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan diatas maka dapat kita pahami bahwa Akad *Mudharabah* merupakan kontrak bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana, dimana pemilik dana sebagai *shaibul maal* menyerahkan premi kepada pengusaha sebagai *mudharib* dan kumpulan dana tersebut dikelola oleh perusahaan untuk dipergunakan untuk saling menanggung di antara pemilik dana jika terjadi kerugian antar peserta. Jika perjanjian di antara kedua belah pihak pada akhir mendapatkan keuntungan maka keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara kedua belah pihak dengan prinsip *mudharabah*.⁷⁶



⁷⁵Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/200 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*)

⁷⁶Abdullah Amrin, *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 61

pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Surat Al-Muzammil ayat 20 dalam kitab Al-Misbah karya Muhammad Quraishy Shihab menafsirkan bahwa :
 “Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar bangkit melaksanakan shalat al-Lail, dua pertiga malam, seperdua malam, dan sepertiga malam dan dilaksanakan pula oleh sebagian sahabat beliau, namun ternyata sebagian mereka mengalami kesulitan. Kemudian Allah memberikan keringanan serta alternatif pengganti bagi shalat al-Lail yang tidak mampu dilakukan secara sempurna itu. Keringat yang bercucuran karena kerja keras, otak yang lelah setelah diperas, tidak kurang nilai ibadahnya dari berdiri, ruku’ dan sujud dihadapan Mihrab. Dalam bukunya *Hadza Dinuna* al-Ghazali menuliskan bahwa “perdagangan di nilai oleh Rasulullah saw. Sebagai jihad dan dipersamakan oleh al-Qur’an dengan peperangan dari segi keizinan Tuhan bagi yang melakukannya untuk tidak melaksanakan shalat al-Lail, perdagangan yang demikian itu halnya hanyalah disertai dengan jiwa yang suci sambil menjauhi segala perilaku amoral seperti penipuan, kebohongan kekejaman, riba, dan lain-lain”.⁷⁷

⁷⁷Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* . hlm.540.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Allah telah memberikan keringanan dan alternatif pengganti atas pelaksanaan perintah shalat malam yaitu shalat pada waktu dua pertiga malam, seperdua malam, dan sepertiga malam bagi orang-orang yang mempunyai udzur seperti karena sakit, bekerja mencari rizki, bermuamalah atau sebab lainnya. karena hal tersebut tidaklah kurang nilai ibadahnya dari berdiri, ruku' dan sujud dihadapan Mihrab. Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dalam kitab Al-Misbah karya Muhammad Quraishy Shihab menafsirkan bahwa : “Lalu, apabila telah ditunaikan shalat , maka jika kamu mau, maka bertebaranlah dimuka bumi untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah dan carilah dengan bersungguh-sungguh sebagian dari karunia Allah, karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, dan ingatlah Allah banyak-banyak jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat

dan di setiap tempat dengan hati atau bersama lidah kamu supaya kamu beruntung memperoleh apa yang kamu dambakan.⁷⁸

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa setelah perintah shalat Jum'at dilaksanakan maka Allah telah memberikan anjuran kepada umat muslim agar melanjutkan kembali aktifitas duniawinya yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya (seperti bermuamalah), yang mana sebelumnya telah ditinggalkan sementara waktu karena harus segera menghadap Mihrab.

Pada dasarnya ayat-ayat diatas tidak secara langsung menjelaskan akad *mudharabah*, hanya saja secara maknawi mengandung arti kegiatan ekonomi melalui *mudharabah*. Dengan demikian, ayat-ayat tersebut bisa dijadikan andasan hukum akad *mudharabah*. Adapun juga landasan dari As-Sunnah yang menjelaskan atau menyinggung masalah *mudharabah* yaitu :

Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu 'Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

⁷⁸Muhammad Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* . h. 230.

Artinya : "Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya." (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)⁷⁹

Dan hadis yang kedua yaitu hadi riwayat Ibnu Majah yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن

صهيب)

Artinya : "Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)⁸⁰

Hadis di atas secara langsung menyinggung masalah *mudharabah* riwayat pertama merupakan Al-Sunnah *al-taqiririyah* atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku atau tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudharabah*. Sementara hadis kedua secara tegas menyebut akad *mudharabah*, hanya saja menggunakan istilah *muqaradah*. Kedua hadis ini menjadi landasan yang diperbolehkan dan diniatkannya *mudharabah*.

⁷⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 152

⁸⁰*Ibid.*

Adapun *ijma'* dalam *mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Disisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal, dengan demikian adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat.⁸¹

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸²

Berdasarkan landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa *mudharabah* diisyaratkan oleh firman Allah, Hadist, *Ijma'*, dan *Qiyas* dan diberlakukan pada masa Rasulullah SAW dan beliau tidak melarangnya, karena manusia dapat saling bermanfaat untuk orang lain.

⁸¹Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 224.

⁸²H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranamedia, 2011), h. 185.

Disamping itu, dalam menjelaskan tentang pembiayaan *mudharabah* menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-MUI/X/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*Qiradh*). Dalam keputusannya tersebut menjelaskan transaksi *mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.⁸³

Selain itu, pensyariatkan *mudharabah* juga dianalogkan atau diqiyaskan dengan *musaqah*. Namun demikian, sebagian kalangan ulama tidak memasukkan dari berbagai penjelasan di atas. Dapat kita pahami, bagi hasil/*mudharabah* memang telah ada sejak sebelum Islam datang dan tersebar luas di muka bumi, adapun alasan mengapa bagi hasil/*mudharabah* dibolehkan karena dari beberapa hal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sebelumnya.

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Sebagaimana akad lain dalam syariah islam, agar *mudharabah* menjadi sah, maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat

⁸³Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*)

tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi fasid (rusak):⁸⁴

1. Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku, jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual-beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. Faktor pertama yaitu pelaku kiranya sudah cukup jelas. Dalam akad *mudharabah*, harus terdapat minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan pihak kedua sebagai pemilik modal (*shahibul maal*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek dalam akad *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha (*mudharib*) menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal

⁸⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003), h. 205.

yang diserahkan oleh pemilik modal bisa dalam bentuk uang maupun barang yang dirinci sesuai nilai uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *sellingskill*, *management skill* dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Namun modal haruslah berupa uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *mudharabah*.⁸⁵ Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh kedua belah pihak (*mudharib dan shahibul maal*). Para fuqaha bersepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Karena tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi dana apapun ke *mudharib*, padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena akan merusak sahnya akad.

c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul)

Persetujuan kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* yaitu harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Pemilik dana

⁸⁵ *Ibid*

setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.⁸⁶

d. Nisbah Keuntungan

Nisbah merupakan rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad *mudharabah*. Dimana nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima oleh *shahibul maal* ataupun *mudharib*. *Shahibul maal* mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan *mudharib* mendapatkan imbalan dari kerjanya.⁸⁷

2. Syarat

Syarat-syarat sah *mudharabah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. *Shahibul maal* dan *mudharib*

Syarat antara *shahibul maal* dan *mudharib* adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal ini dikarenakan *mudharib* bekerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur *wakalah* yang mengandung arti mewakilkan. Syarat antara keduanya juga harus orang yang

⁸⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 226

⁸⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003) h. 205.

cakap untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecakapan, seperti gila, sakit dan lain-lain.

2. *Sighat ijab dan qabul*

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul maka akad *mudharabah*-nya telah sah.⁸⁸

3. Modal

Modal merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:

- a. Modal harus berupa keuangan
- b. Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- c. Modal harus tunai bukan utang
- d. Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

4. Nisbah Keuntungan

Keuntungan nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak dan proporsi dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus

⁸⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 226.

jelas dan dinyatakan dalam bentuk persentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.⁸⁹

Apabila laba usahannya lebih besar maka kedua belah pihak akan menerima bagian yang besar pula. Tapi apabila labanya kecil maka keduanya akan mendapatkan bagian yang kecil pula. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kontrak dan dilakukan diawal perjanjian, jadi angka besaran nisbah ini muncul dari hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib*, dengan demikian angka nisbah ini bervariasi seperti yang sudah disebutkan..⁹⁰

4. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqoyyadhah* yaitu:⁹¹

1. *Mudharabah mutlaqah*

Pada prinsipnya, *mudharabah* bersifat mutlak dimana *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Bentuk ini sering disebut dengan *mudharabah mutalqah*. *Mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat) adalah akad

⁸⁹Ascakarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 62.

⁹⁰Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003) h. 206.

⁹¹Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 118.

perjanjian antara kedua belah pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya asset dana yang diinvestasikannya kepada *mudharib* untuk mengelola usaha sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya serta wilayah bisnis yang akan dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahannya asalkan sesuai dengan prinsip syariah. Di samping itu apabila terjadi kerugian yang bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola dana, maka kerugian ini akan ditanggung oleh pemilik dana.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah jasa yang diberikan dengan cara mempertemukan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang ingin menginvestasikan modalnya dengan pihak pengelola (*mudharib*) yang mempunyai suatu proyek/usaha yang layak, yang sebelumnya telah dilakukan analisa-analisa bisnis yang layak terlebih dahulu.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa *mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu yang bersifat tidak terbatas (*mutlaqah*) dan yang bersifat terbatas (*muqayyadah*). Pada jenis *mudharabah* yang pertama, pemilik dana memberikan otoritas dan hak

sepenuhnya kepada *mudharib* untuk menginvestasikan uangnya. Pada jenis *mudharabah* yang kedua, pemilik dana memberi batasan kepada *mudharib*. Diantara batasan itu misalnya jenis investasi, tempat investasi dan sebagainya.

C. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa apa yang menjadi masalah pokok penelitian ini tampaknya sangat penting. Adapun review studi terdahulu yang digunakan penulis, diantara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Laelatul Rizqi pada tahun 2012 dalam judul skripsinya “Akad Mudharabah dalam Asuransi Syariah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)”.⁹² Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya pendapat masyarakat yang belum memahami kedudukan akad mudharabah dari asuransi syariah itu sendiri, adapun sengketa yang sering terjadi terletak pada kedudukan akad mudharabah yang digunakan asuransi syariah terhadap syariah Islam, sehingga dibutuhkannya suatu penyelesaian seperti akibat hukum yang harus diterapkan terhadap akad mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam dan mengenai mekanisme hukum yang dapat digunakan dalam permasalahan tersebut.

⁹²Lalelatul Rizqi, “Akad Mudharabah Dalam Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012), di akses pada Hari Minggu, Tanggal 29 Oktober 2017, Pukul 18.00 WIB.

2. Merujuk juga pada penelitian yang dilakukan oleh Fenti Fumiaty⁹³, dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar (Studi Kasus Tabungan M-Dinar Di BMT Artha Kencana Mulia Semarang Baitul Mal wat Tamwil (BMT))” dalam penelitiannya dijelaskan bahwa BMT Artha Kencana Mulia Semarang, merupakan salah satu lembaga keuangan syari’ah yang menyediakan produk penghimpunan dana berupa investasi mudharabah. Menyediakan wadah investasi di bidang keuangan syariah melalui produk Dinar. BMT Artha Kencana Mulia menghadirkan kembali Dinar dan Dirham sebagai solusi dan timbangan yang adil di tengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam operasionalnya, BMT Artha Kencana Mulia Semarang menghimpun dana untuk diinvestasikan dalam bentuk dinar (dirham) dengan sistem bagi hasil mudharabah. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah (penabung atau shahibul maal) setiap bulannya ke rekening masing-masing. Nisbah yang ditentukan di awal perjanjian adalah 50:50, dengan keuntungan yang didapat dari usaha pengadaan dinar itu sendiri. Dimana hal ini dirasa belum sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum Islam, dimana BMT tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap per bulan dalam jumlah tertentu dengan

⁹³Fenti Fumiaty, “Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar”. (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012).

sistem persentase sebagaimana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maunah pada tahun 2008 dalam judul skripsinya “Penerapan Akad Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon)”. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan didalam operasionalnya perusahaan takaful melakukan kerjasama dengan peserta takaful (pemegang polis asuransi) atas dasar akad mudharabah, perusahaan takaful bertindak sebagai al-mudharib penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan *shahibul maal* adalah peserta takaful yang memperoleh manfaat jasa perlindungan. Apabila akad mudharabah dilaksanakan sesuai ketentuan syariat, maka bukan tidak mungkin kepercayaan dan minat masyarakat terhadap asuransi takaful akan meningkat dan masyarakat juga akan semakin merasa puas terhadap penerapan akad mudharabah tersebut.⁹⁴
4. Rohmi Maulidah, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2011. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (*Mudharabah*) Takaful Investasi (Studi Lapangan di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Tangerang)”

⁹⁴Siti Maunah, “Penerapan Akad Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon)”. Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, 2008.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Analisis” (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/analisis> (12 April 2019)

Al Arif, M. NurRianto, *Pemasaran Strategi pada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015

Ali, AM. Hasan Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analitis Historis, Teoritis, & Praktis, Jakarta: Prenada Media, 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), h. 5

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta : Maghfirah Pustaka, 2006), Q.S. Al-Maidah (5) : 2.

Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), Q.S. Luqman (31) : 34.

Amrin, Abdullah *Bisnis, Ekonomi, Asuransi dan Keuangan Syariah*, Jakarta: Grasindo, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Arsyad, Lincollin dan Soeratno *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2008

Ashfia, Tazkiah dkk, Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSNMUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Ascakarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Brata, Sumadi Surya, *Metodologi Penelitian, Cet. Ke-II*, Jakarta: Raja Grafindo, 1988

Dewi ,Gemala et.al, *Hukum Perikatan Islam*, Jakarta: Fajar Inter Pratama Off Set, 2000.

Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Pranamedia, 2011.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fumiaty, Fenti, "*Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah Terhadap Investasi Dinar*". (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012) diakses pada tanggal 21 juni 2018.

Fuad, M. dkk, *Pengantar Bisnis*, Cet ke-1, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global*, Cet ke-4, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Hamalik, Oemar *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Cet ke-1, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.

Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Ghofur, Ruslan Abdul, *Konstruksi Akad, Jurnal Al-'Adalah Hukum Islam*, Vol.XII, No.3, Juni 2015

Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Bandung: CV Maju. Bandung, 1990.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Khallaf, Abdul Wahbah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Terjemah Talhah Mansyur, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

- Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 3*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2009.
- Kun, Rezky dan Syahrída Sholehah *Asuransi Syariah*, Cet ke-1, Yogyakarta: Parama Publishing, 2015
- Maulida, Rohmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Bagi Hasil (Mudharabah) Takaful Investasi (Studi Lapangan di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Tangerang)*”, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2011,
- Maunah, Siti, “*Penerapan Akad Mudharabah Dan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Di PT Asuransi Takaful Umum Cabang Cirebon)*”, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon, 2008.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012
- Moloeng, Lexy J, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Jakarta: Remaja Rosdakarya, cet xxvi, 2009.
- Mubarak, Jaih, *Fikih Mu’amalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Cet ke-1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004
- Pemasaran Strategi kepada Asuransi Syariah Kesehatan, Pendidikan, Jiwa*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Naf’an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nopriansyah, Walid, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*, Cet ke-1, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016.
- Nurhasanah, Neneng *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Cet ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Cet ke-2, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Rizqi, Lalelatul “*Akad Mudharabah Dalam Asuransi Syari’ah (Studi Kasus di Asuransi Takaful Jember)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.

Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, Malang: UIN Fakultas Syari’ah, 2006

Salim, Abbas, *Asuransi & Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Shihab, Muhammad Quraish *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 540.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Cet ke-2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2013.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Teras. 2009.

Widyaningsing dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Jurnal

Cennery, Jelisye putri, Engrina Fauzi, Elwidarifa Marwenny, “Tinjauan Hukum Asuransi Syariah Berbasis Investasi Dalam Hal Evenement”, *Jurnal Lex Librum*, Vol. 5. No. 1, Desember 2018.

Effendi, Arif, Asuransi Syariah Indonesia (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah), *Jurnal Wahan Akademia*, Vol. 3 No. 2 Oktober 2016.

Hasanah, Uswatun *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, Vol 47 No. 1, Juni 2013.

Hulam, Taufiqul, Jaminan Dalam Transaksi Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22. No. 3, Oktober 2010.

Suripto, Teguh dan Abdullah Salam, Analisa Prinsip Syariah Dalam Asuransi Syariah, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.VII No. 2, Desember 2017.

Wawancara

Lestari, Anggun, Wawancara dengan Staff Administrasi pada PT. Takaful Keluarga Bandar Lampung Tanggal 10 September 2019.

Siti, Wawancara dengan Nasabah Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung, tanggal 11 September 2019.

Suprapti, Wawancara dengan, Nasabah Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung, tanggal 11 September 2019.

Ika, Wawancara dengan, Nasabah Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Lampung, tanggal 11 September 2019.

Sumberon-line

“Analisis” (On-Line), tersedia di: <https://kbbi.web.id/analisis>, 12 April 2019.

<http://www.takaful.co.id/>, di akses pada tanggal 10 september.

